

Selasa, 26 Oktober 2010

Dewan Sampaikan Rekomendasi Walikota Siap Tindaklanjuti

SINGKAWANG (MED) - Rapor merah yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang menjadi pertimbangan enam Fraksi DPRD Kota Singkawang dalam menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda Pertanggungjawangan APBD 2009, Senin (25/10). Walaupun menerima Raperda tersebut, tapi seluruh Fraksi mengeluarkan Rekomendasi dan Walikota Singkawang, Dr. Hasan Karman SH,MM siap tindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Secara keseluruhan, keenam Fraksi di DPRD yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PIB, Fraksi PDI-P, Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah (Akseda) dan Fraksi Perjuangan Kedaulatan Rakyat menyampaikan rekomendasi yang hampir sama. Mereka menemukan hal-hal ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan daerah, yang cukup menjadi perhatian adalah adanya 7 SKPD pemerintah Kota Singkawang yang tidak pernah menyusun laporan keuangan, 2 SKPD lainnya menyusun laporan keuangan tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami memang menerima raperda tersebut, tapi dengan catatan semua SKPD harus melaksanakan perbaikan dari rekomendasi BPK RI, dan sesuai ketentuan itu harus dilakukan dalam waktu 60 hari," ucap anggota Fraksi PDI-P, Tasman saat ditemui usai Paripurna kemarin.

Walaupun tidak mengetahui SKPD mana saja yang tidak menyusun laporan keuangannya, tapi

menurut Tasman, Walikota harus tanggap terhadap masukan-masukan dan evaluasi dari Fraksi terhadap SKPD yang ada, paling tidak mengevaluasi kinerja mereka, selain itu memberikan kesempatan kepada pegawai yang layak, dilihat dari jabatan, ataupun pangkat, "Jangan yang sudah masuk masa pensiun tetap diperpanjang, inikan sama saja menghambat karir Pegawai yang punya potensi," ungkapnya.

Usa panpuma, Walikota Singkawang, Dr. Hasan Karman, SH, MM mengatakan, sebenarnya hasil audit BPK itu sudah diterima dan ia secara pribadi selaku walikota sudah mengirim surat kepada SKFD yang disinggung dalam audit BPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu dan segera diperbaiki apa yang kurang harus segera disempurnakan.

"Temuan itu bukan ada kerugian Negara, atau korupsi tapi lebih cenderung kepada administrasi, misalnya bansos, penerima bantuan itu tidak bisa memberikan pertanggungjawaban atau SPJ nya. Di tahun 2007 dan 2008 ada belum selesai dan panitia sudah bubar, itu yang mempersulit kita memberikan bantuan, malah ada rekomendasi salah satu Fraksi yang membatasi bansos, inikan susah juga kan," tukasnya.

Mengenai permintaan Fraksi supaya SKPD menindaklanjuti hasil audit BPK, akan segera ditindaklanjutinya, apalagi sesuai ketentuan audit itu diberi batas 60 hari.

Mengenai evaluasi dan soal pergantian SKPD, orang nomor satu di Kota Singkawang ini melanjutkan bahwa melakukan hal tersebut tidaklah seperti membalikkan tela-

pak tangan, ada mekanisme yang harus dilalui, apalagi SDM di Kota Singkawang sangat terbatas, "Bukan gampang ganti-ganti Kepala Dinas, tapi tetap ada perhatian lah. Saya bukan presiden, kalau presiden nyaman mengganti kabinet, bisa ambil dari praktisi maupun akademisi, kalau pemerintah daerah itu harus pejabat karir di birokrasi, ini karena system," ungkapnya.

Ia mencontohkan, di Dinas Budaya dan Pariwisata seharusnya orang yang mengerti pariwisata, yang ada di dalam birokrasi sekarang ini tidak mengerti pariwisata, "Kecuali kalau ada orang yang berpengalaman di dibidang pariwisata atau orang yang berpengalaman atau mantan pengusaha yang punya bisnis pariwisata, sekarang ini yang ada lulusan APDN mana bisa menangan-kan wisata, termasuk perdagangan dan koperasi," ungkapnya.

Istilah *right man on the right place* itu terkadang tidak berlaku, seorang birokrasi dapat melakukan hal tersebut kalau dia mau belajar dan itu akan cepat, "Syukur-syukur di Pertanian kita ada insiyur pertanian yang memang orangnya tepat, selebihnya masih ada yang belum sesuai dengan bidangnya, ini yang sulit, terkadang keterlambatan kaderisasi kenaikan pangkat, eselon, itu ada aaturannya, jadi tidak sesimple itu. semua aspek harus kita pikirkan dengan matang, termasuk perpanjangan atau masa pensiun, undang-undang membolehkan memperpanjang, dan itu dilakukan dengan sangat selektif, tidak ada istilah *like and dislike*," pungkasnya. **(RUD)**